

Pengaruh Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Kupang

Yehezkiel Arya Ruku^{1*}, Anthon S.Y Kerih², Olivia L. E. Tomasowa³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: aryaruku@gmail.com¹, kerihianthon@gmail.com², olivia.tomasowa@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: aryaruku@gmail.com

Abstract. *This study was motivated by the implementation of regional autonomy, which grants local governments the authority to manage their finances independently in a transparent and effective manner. The existence of phenomena and research gaps in previous studies indicates that problems in regional financial management still persist. Therefore, this study aims to examine the six dimensions of the Regional Financial Management Index (IPKD) in an integrated manner. This research employed a quantitative descriptive approach to analyze phenomena related to the Regional Financial Management Index (IPKD). The results of the study show that: (1) The alignment between planning and budgeting documents does not have a significant effect on financial performance because governments tend to adjust to actual needs. (2) The allocation of the regional budget (APBD) does not determine performance, but rather the effectiveness and efficiency of its management have a greater influence; (3) Regional financial transparency has not had a significant impact because it is still largely administrative in nature; (4) Budget absorption does not reflect good performance because it focuses more on outputs rather than outcomes; (5) Regional financial conditions have a positive and significant effect on financial management performance. The better the financial condition of a region, the greater the government's ability to manage finances effectively and sustainably; (6) The audit opinion of the Audit Board of Indonesia (BPK) on regional government financial statements (LKPD) has a positive effect because it reflects accountable financial management.*

Keywords: *Budgeting; Effective; LPKD; Performance; Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangannya secara mandiri secara transparan dan efektif. Adanya fenomena maupun kesenjangan GAP dalam penelitian-penelitian sebelumnya masih adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keenam dimensi IPKD secara terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif menganalisis fenomena yang berkaitan dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena pemerintah lebih menyesuaikan kebutuhan aktual, (2) Pengalokasian anggaran APBD tidak menentukan kinerja, tetapi efektivitas dan efisiensi pengelolaannya yang lebih berpengaruh, (3) Transparansi keuangan daerah belum berdampak signifikan karena masih bersifat administratif, (4) Penyerapan anggaran tidak mencerminkan kinerja yang baik karena lebih fokus pada *output* daripada *outcome*, (5) Kondisi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Semakin baik kondisi keuangan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan secara efektif dan berkelanjutan, (6) Opini BPK atas LKPD berpengaruh positif karena mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Seluruh dimensi IPKD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: Efektif; LPKD; Kinerja; Penganggaran; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah masih menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi optimalisasi kinerja pemerintah daerah (KPK, 2022).

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Meskipun demikian, penerapan IPKD masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, rendahnya transparansi laporan keuangan, serta belum optimalnya penyerapan anggaran. Selain itu, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK belum sepenuhnya menjamin bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan secara efektif dan efisien, karena masih terdapat daerah yang menghadapi masalah dalam tata kelola keuangan meskipun memperoleh opini tersebut (Kemenkeu, 2022). Data anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kota Kupang menunjukkan bahwa pencapaian kinerja keuangan masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Meskipun Pemerintah Kota Kupang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam IHPS menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kesalahan penganggaran akibat ketidaksesuaian pos belanja serta kelebihan pembayaran pada belanja pegawai dan belanja barang/jasa, termasuk tunjangan, honorarium, dan perjalanan dinas yang terjadi secara berulang (Gumelar, 2018).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak dapat dijadikan indikator bahwa anggaran telah dikelola secara efisien dan efektif. Opini tersebut semata-mata menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran secara komprehensif, diperlukan evaluasi lebih mendalam mengenai dampak nyata penggunaan anggaran terhadap pembangunan serta kualitas pelayanan publik. Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini semakin diperkuat oleh beragam temuan yang tidak konsisten dalam studi-studi sebelumnya, Ariesmawati (2020) menemukan bahwa perencanaan dan penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja perangkat daerah di Kutai Timur. Namun, dalam variabel belanja daerah, hasil berbeda ditemukan oleh Armaja (2015) di Aceh yang menunjukkan pengaruh positif, dan Bilqis (2023) di Jawa Tengah yang justru menemukan pengaruh negatif signifikan. Penelitian ini menjadi salah satu acuan penting karena mengkaji keenam dimensi IPKD secara terintegrasi. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan studi serupa yang secara komprehensif meneliti pengaruh dimensi IPKD terhadap kinerja pengelolaan keuangan di wilayah Kota Kupang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan merupakan interaksi antara prinsipal dan agen, dimana agen diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Dalam konteks, pemerintah daerah, pemerintah bertindak sebagai agen yang diberikan mandat oleh masyarakat (sebagai prinsipal) untuk mengelola sumber daya dan anggaran daerah dengan sebaik-baiknya. Namun, seringkali terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi atau politik yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam hubungan keagenan ini, di mana pemerintah diharapkan dapat memberikan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai prinsipal. Berdasarkan hal ini, hubungan keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga dengan penguatan mekanisme kontrol yang dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh agen. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, Zelmianti (2016) menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, namun Nasution (2018) menemukan pengaruh negatif pada kasus di Sumatera Utara. Penyerapan anggaran menunjukkan hasil signifikan dalam studi Priagung et al. (2016) di Banjarnegara, tetapi berbeda dengan hasil dari Arniwita (2019) di Jambi. Demikian pula variabel kondisi keuangan dan opini audit juga menghasilkan temuan yang beragam, sebagaimana diteliti oleh (Andirfa et al., 2016; Parwanto, 2017). Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, jelas terlihat adanya inkonsistensi hasil, perbedaan metode, lokasi, dan fokus variabel yang menjadikan pentingnya dilakukan studi yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh enam dimensi IPKD sebagaimana tertuang dalam Kementerian Dalam Negeri (2020) terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kota Kupang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, serta studi pustaka, dengan populasi penelitian sebanyak 84 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random sampling menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Analisis data dilakukan melalui pengelompokan, tabulasi, dan penyajian data berdasarkan variabel penelitian, kemudian diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan Cronbach Alpha. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linier

berganda yang didukung uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji t, uji f, serta koefisien determinasi untuk menjawab hipotesis penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian dilakukan di Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji validitas beberapa variabel dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dan r-tabel. Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,1. Pada r-tabel dengan uji dua arah, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak (n) = 69 dan besarnya df dapat dihitung berdasarkan ketentuannya yaitu (df) = n-2, sehingga df yang digunakan adalah 69-2= 67, maka didapat r tabelnya sebesar 0.199. Uji validitas variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

Variabel	P	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (X1)	X1.1	0,775	0,199	Valid
	X1.2	0,693	0,199	Valid
	X1.3	0,632	0,199	Valid
	X1.4	0,654	0,199	Valid
	X1.5	0,636	0,199	Valid
	X1.6	0,696	0,199	Valid
	X1.7	0,721	0,199	Valid
	X1.8	0,711	0,199	Valid
	X1.9	0,788	0,199	Valid
	X1.10	0,755	0,199	Valid
	X1.11	0,692	0,199	Valid
	X1.12	0,758	0,199	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026

Uji Validitas Variabel Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (X2) yang disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Uji Validitas Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD.

Variabel	P	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Pengalokasian	X2.1	0,719	0,199	Valid
anggaran	X2.2	0,728	0,199	Valid
belanja dalam	X2.3	0,728	0,199	Valid
APBD (X2)	X2.4	0,707	0,199	Valid
	X2.5	0,748	0,199	Valid
	X2.6	0,797	0,199	Valid
	X2.7	0,706	0,199	Valid
	X2.8	0,713	0,199	Valid
	X2.9	0,730	0,199	Valid
	X2.10	0,706	0,199	Valid
	X2.11	0,739	0,199	Valid
	X2.12	0,642	0,199	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026

Uji Validitas Variabel Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X3) yang disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Variabel	P	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Transparansi	X3.1	0,767	0,199	Valid
pengelolaan	X3.2	0,789	0,199	Valid
keuangan	X3.3	0,817	0,199	Valid
daerah (X3)	X3.4	0,769	0,199	Valid
	X3.5	0,612	0,199	Valid
	X3.6	0,710	0,199	Valid
	X3.7	0,810	0,199	Valid
	X3.8	0,683	0,199	Valid
	X3.9	0,804	0,199	Valid
	X3.10	0,842	0,199	Valid
	X3.11	0,771	0,199	Valid
	X3.12	0,734	0,199	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026

Uji Validitas Variabel Penyerapan(X4) yang disajikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Penyerapan.

Variabel	P	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Penyerapan	X4.1	0,847	0,199	Valid
(X4)	X4.2	0,794	0,199	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026

Uji Validitas Variabel Kondisi keuangan daerah (X5) yang disajikan dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan Daerah.

Variabel	P	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Kondisi keuangan daerah (X5)	X5.1	0,800	0,199	Valid
	X5.2	0,722	0,199	Valid
	X5.3	0,690	0,199	Valid
	X5.4	0,585	0,199	Valid
	X5.5	0,738	0,199	Valid
	X5.6	0,772	0,199	Valid
	X5.7	0,693	0,199	Valid
	X5.8	0,716	0,199	Valid
	X5.9	0,621	0,199	Valid
	X5.10	0,822	0,199	Valid
	X5.11	0,746	0,199	Valid
	X5.12	0,680	0,199	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026

Uji Validitas Variabel Opini BPK atas LKPD (X6) yang disajikan dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Uji Validitas Variabel Opini BPK atas LKPD.

Variabel	P	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Opini BPK atas LKPD (X6)	X6.1	0,693	0,199	Valid
	X6.2	0,687	0,199	Valid
	X6.3	0,730	0,199	Valid
	X6.4	0,662	0,199	Valid
	X6.5	0,706	0,199	Valid
	X6.6	0,725	0,199	Valid
	X6.7	0,734	0,199	Valid
	X6.8	0,684	0,199	Valid
	X6.9	0,581	0,199	Valid
	X6.10	0,731	0,199	Valid
	X6.11	0,769	0,199	Valid
	X6.12	0,783	0,199	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang (Y) disajikan dalam Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Uji Validitas Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Kupang.

Variabel	P	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang (Y)	Y.1	0,767	0,199	Valid
	Y.2	0,678	0,199	Valid
	Y.3	0,715	0,199	Valid
	Y.4	0,775	0,199	Valid
	Y.5	0,673	0,199	Valid
	Y.6	0,780	0,199	Valid
	Y.7	0,796	0,199	Valid
	Y.8	0,684	0,199	Valid
	Y.9	0,745	0,199	Valid
	Y.10	0,713	0,199	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Ghazali (2016) menyatakan bahwa suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan melihat *cronbach's alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* > 0,60 (Gumelar, 2018). Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas.

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (X1)	0,910	Reliabel
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (X2)	0,916	Reliabel
Transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3)	0,933	Reliabel
Penyerapan (X4)	0,513	Reliabel
Kondisi keuangan daerah (X5)	0,914	Reliabel
Opini BPK atas LKPD (X6)	0,909	Reliabel
Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang (Y)	0,904	Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026

Pada Tabel 8 nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sebesar 0.910, variabel Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,916, variabel Transparansi pengelolaan keuangan daerah nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,933, variabel Penyerapan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,513, variabel tax rate nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,758 dan untuk variabel persepsi etika penggelapan pajak nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,748. Untuk suatu data dikatakan reliabel maka nilai *Cronbach's Alpha* harus > 0.60 dan keenam variabel tersebut nilai *Cronbach's Alpha* > 0.60, maka dapat dikatakan keenam variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif disajikan dalam tabel 9 berikut:

Tabel 9. Stastitik Deskriptif.

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	68	19	60	52.96	6.349
X2	69	20	60	53.26	6.377
X3	69	20	60	52.71	7.472
X4	69	4	10	8.77	1.226
X5	69	23	60	52.86	6.574
X6	69	21	60	52.61	6.614
Y	69	17	50	44.22	5.625
Valid N (listwise)	68				

Sumber : Diolah Peneliti, Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 9 data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 6 indikator dengan 12 pertanyaan untuk variabel Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, menunjukkan nilai minimum 19 dan maksimum 60 dengan rata-rata 52,96 yang lebih besar dari standard deviasi sebesar 6,349 sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan nilai merata. Untuk variabel Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, menunjukkan nilai minimum 20 dan maksimum 60 dengan rata-rata 53,26 yang lebih besar dari standar deviasi sebesar 6.337 sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan nilai merata. Analisis Deskriptif Transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3) variabel Transparansi pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan nilai minimum 20 dan maksimum 60 dengan rata-rata 52.71 yang lebih besar dari standard deviasi sebesar 7.472 sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan nilai merata. Analisis Deskriptif Penyerapan (X4) menunjukkan nilai minimum 4 dan maksimum 10 dengan rata-rata 8.77 yang lebih besar dari standard deviasi sebesar 1.226 sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan nilai merata. Analisis Deskriptif Kondisi Keuangan Daerah (X5) menunjukkan nilai minimum 23 dan maksimum 60 dengan rata-rata 52.86 yang lebih besar dari standard deviasi sebesar 6.574 sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan nilai merata. Opini BPK atas LKPD (X6), nilai minimum 21 dan maksimum 60 dengan rata-rata 52.61 yang lebih besar dari standard deviasi sebesar 6,614 sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan nilai merata. Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Kupang (Y), nilai minimum 17 dan maksimum 50 dengan rata-rata 44.22 yang lebih besar dari standard deviasi sebesar 5,625 sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan nilai merata.

Uji Regresi Linear Berganda

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh antara beberapa atau lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2015). Analisis regresi berganda akan dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel independennya minimal 2 variabel. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

	Model	Unstandardized	Standardized		T	Sig.
		Coefficients B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	9.753	2,586		3,536	0,000
	TOTAL_X1	,120	,087	,135	1,383	,172
	TOTAL_X2	,120	,092	,136	1,301	,198
	TOTAL_X3	,060	,072	,080	,839	,405
	TOTAL_X4	,014	,381	,003	,037	,971
	TOTAL_X5	,284	,085	,331	3,349	,001
	TOTAL_X6	,389	,094	,457	4,150	,000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 10, maka didapat hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : $Y=9,753 + 0,120X_1 + 0,120X_2 + 0,060X_3 + 0,014X_4 + 0,284X_5 + 0,389X_6 + e$

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 9,753 mengindikasikan bahwa ketika seluruh variabel independen, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD dianggap bernilai nol, maka kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang tetap berada pada angka 9,753. Selain itu, seluruh variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, dengan kontribusi terbesar berasal dari opini BPK atas LKPD sebesar 38,9%, diikuti kondisi keuangan daerah sebesar 28,4%, sedangkan variabel lainnya seperti kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, transparansi, serta penyerapan anggaran juga memberikan peningkatan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam perhitungan, apabila diperoleh nilai signifikan $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas menggunakan *one sample Kolmogorov-smirnov*:

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas.

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,24128779
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,108
	<i>Positive</i>	,104
	<i>Negative</i>	-,108
Kolmogorov-Smirnov Z		,899
Asymp. Sig. (2-tailed)		,393
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026

Pada Tabel 11 menunjukkan bahwa pada pengujian normalitas jumlah sampel yang digunakan sebanyak 69 dengan uji *one sample Kolmogorov Smirnov* memperoleh tingkat signifikansi 0,393, maka dikatakan variabel berdistribusi normal dikarenakan hasil signifikansi (2-tailed) yakni $0.393 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji Multikolinearitas nilai *tolerance value* dari semua variabel sebesar 0,269 (X1), 0,236 (X2), 0,282(X3), 0,370(X4), 0,261 (X5), 0,211(X6) dimana semua nilai tersebut lebih besar dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dari semua variabel sebesar 3,718(X1), 4,238 (X2), 3,551 (X3), 2,701(X4), 3,826(X5) dan 4,745(X6). Maka masing-masing variabel nilai tolerancenya $> 0,10$ dan nilai VIFnya < 10 . Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas, hal ini karena nilai tolerance yang didapat $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji *spearman rho* tidak terjadi heterokedastisitas dikarenakan nilai *p-value* atau sig. (2-tailed) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (0,975), Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (0.304), Transparansi pengelolaan keuangan daerah(0,358), Penyerapan(0,921), Kondisi keuangan daerah(0,724), Opini BPK atas LKPD(0,764) yang lebih besar dari alpha 0.05, sehingga berdasarkan berdasarkan hasil tersebut tidak terjadinya heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Nilai t tabel didapat dari derajat bebas (df) = $n-k-1$, dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen, maka didapat (df) = $69-6-1 = 62$. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi dua sisi, maka nilai signifikansi 0,05, sehingga didapat t-tabel sebesar 1,99897. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Hasil Uji t (Parsial).

	Model	Unstandardized	Standardized		T	Sig.
		Coefficients	Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.753	2,586		3,536	0,000
	TOTAL_X1	,120	,087	,135	1,383	,172
	TOTAL_X2	,120	,092	,136	1,301	,198
	TOTAL_X3	,060	,072	,080	,839	,405
	TOTAL_X4	,014	,381	,003	,037	,971
	TOTAL_X5	,284	,085	,331	3,349	,001
	TOTAL_X6	,389	,094	,457	4,150	,000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber : Diolah Peneliti, Tahun 2026

Berdasarkan tabel 12, maka dapat dilakukan pembuktian dengan nilai t-tabel yang diketahui sebesar 1,99897. Hasil uji parsial, variabel kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta penyerapan anggaran menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 dan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel, sehingga secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang. Sementara itu, variabel kondisi keuangan daerah dan opini BPK atas LKPD memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dengan t-hitung lebih besar dari t-tabel, sehingga terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang. Di antara seluruh variabel, opini BPK atas LKPD memberikan pengaruh paling besar, diikuti oleh kondisi keuangan daerah.

Uji Simultan (F)

Menurut Ghazali (2016) pengujian hipotesis secara simultan atau bersamaan merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Jika nilai signifikansi < 0.05 dan F-hitung $> F$ -tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y. Untuk mendapatkan nilai F dapat digunakan rumus $F\text{-tabel} = F(k-; n-k) = t(5;63) = 2,361$. Hasil uji simultan (Uji F) dapat dilihat pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13. Hasil Uji F (Simultan).

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	1810,150	6	301,692	54,758	.000 ^b
	<i>Residual</i>	341,589	62	5,510		
	<i>Total</i>	2151,739	68			

a. *Dependent Variable:* TOTAL_Y
b. *Predictors:* (Constant), TOTAL_X6, TOTAL_X4, TOTAL_X1, TOTAL_X3, TOTAL_X5, TOTAL_X2

Sumber : Diolah Peneliti, Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 13, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 000^b. hasil tersebut lebih rendah dari nilai $\alpha = 0,05$. Hasil uji F menggunakan program SPSS, dapat dijelaskan nilai F-hitung $54.758 > F\text{-tabel } 2,361$. Maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (X1), Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (X2), transparasi pengelolaan keuangan daerah (X3), penyerapan (X4), kondisi keuangan daerah (X5), opini BPK atas LKPD (X6) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kota Kupang.

Pembahasan

Pengaruh Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Kupang

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan di atas diperoleh koefisien regresi variabel Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebesar 0,120 yang menunjukkan arah positif dan t-hitung sebesar $1,383 < 1,99897$ dengan nilai sig $0,172 > 0,05$. Hipotesis (H0) diterima, artinya Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pada pemerintah kota kupang. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai atau tidaknya dokumen perencanaan dan penganggaran ini tidak berdampak pada kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kota kupang. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah kota kupang lebih fleksibel dengan tujuan mempertahankan kinerja keuangan, penyusunan RKPD tidak serta merta mengikuti RPJMD yang menggambarkan bahwa aspek keselarasan dokumen tidak menjadi faktor sensitif dalam membentuk kinerja keuangan pemerintah kota kupang.

Berdasarkan relevansi penelitian ini dengan teori Keagenan terletak pada komitmen pemerintah dalam membentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja. Berdasarkan teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tranparansi dan memaksimalkan upaya kinerja keuangan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian ini bahwa pemerintah lebih fleksibel dengan kaku pada dokumen jangka panjang tapi lebih mempertimbangkan aspek urgensi, sehingga kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tidak berpengaruh pada kinerja pengelolaan keuangan kota kupang. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ariesmawati (2020) yang menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran tidak terlalu berpengaruh pada kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten semarang. Hal ini menunjukan bahwa dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memang tidak menjadi faktor sensitif bagi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah.

Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Kupang

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan di atas diperoleh koefisien regresi variabel Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD sebesar 0,120 yang menunjukkan arah positif dan t-hitung sebesar $1,301 < 1,99897$ dengan nilai sig $0,198 > 0,05$. Hipotesis (H₀) diterima, artinya Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Kupang. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kota kupang. secara substantif, temuan ini dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya alokasi anggaran belanja belum tentu menentukan baik buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah lebih dipengaruhi oleh faktor lain, bisa seperti efektivitas pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengawasan, serta tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, alokasi anggaran belum tepat sasaran atau belum digunakan secara optimal, sehingga peningkatan anggaran tidak secara langsung berdampak pada peningkatan kinerja. Dengan kata lain, bukan hanya jumlah anggaran yang penting, tetapi bagaimana anggaran tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kupang perlu lebih menekankan pada aspek kualitas pengelolaan anggaran, seperti perencanaan berbasis kinerja, pengendalian internal yang kuat, serta evaluasi penggunaan anggaran, agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Relevansi hasil penelitian ini dengan teori keagenan (*agency theory*) dapat dijelaskan melalui hubungan antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Berdasarkan perspektif teori keagenan, pemerintah daerah (*agent*) diberi mandat oleh masyarakat (*principal*) untuk mengelola sumber daya publik, termasuk APBD, secara efektif, efisien, dan akuntabel. Masyarakat mengharapkan bahwa setiap alokasi anggaran yang ditetapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariesmawati (2020) yang menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tidak berpengaruh secara statistik bagi kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Semarang.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Kupang

Hasil pengolahan data yang dipaparkan, diperoleh koefisien regresi variabel Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah sebesar 0,060 yang menunjukkan arah positif dan t-hitung sebesar $1,839 < 1,99897$ dengan nilai sig $0,405 > 0,05$. Hipotesis (H_0) diterima, artinya Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,060 yang bernilai positif. Ini berarti secara arah hubungan, peningkatan transparansi cenderung diikuti oleh peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Secara substantif, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi telah diterapkan, keberadaannya belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan. Tidak signifikannya pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan dapat disebabkan oleh banyak hal seperti transparansi yang diterapkan kemungkinan hanya bersifat administratif (sekadar penyampaian laporan), sehingga belum mencerminkan kualitas informasi yang benar-benar mendukung perbaikan kinerja, informasi yang disajikan meskipun terbuka belum tentu dimanfaatkan secara optimal oleh pihak terkait, sehingga tidak mendorong perubahan dalam pengelolaan keuangan, transparansi tidak secara langsung memengaruhi kinerja, karena kinerja lebih ditentukan oleh faktor lain seperti efektivitas pelaksanaan anggaran, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur. Oleh karena itu, meskipun transparansi meningkat, hal tersebut belum cukup kuat untuk memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Berdasarkan teori keagenan, tidak berpengaruhnya transparansi terhadap kinerja menunjukkan bahwa transparansi yang ada belum mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah (*agent*) dan masyarakat (*principal*), serta belum efektif menekan perilaku oportunistik. Akibatnya, meskipun informasi keuangan telah dibuka, hal tersebut belum cukup untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ariesmawati (2020) yang menunjukkan hasil yang sama bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan kabupaten Semarang.

Penyerapan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang

Koefisien regresi variabel penyerapan sebesar 0,014 yang menunjukkan arah positif dan t-hitung sebesar $0,037 < 1,99897$ dengan nilai sig $0,971 > 0,05$. Hipotesis (H_0) diterima, artinya penyerapan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyerapan dalam kinerja keuangan kota Kupang belum menjadi hal yang sensitif dalam mempengaruhi tingkat kinerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penyerapan pengelolaan keuangan daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,014 dengan arah positif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang. Hal ini terlihat dari nilai t-hitung sebesar 0,037 yang lebih kecil dari t-tabel 1,99897 serta nilai signifikansi sebesar 0,971 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa secara teoritis, peningkatan penyerapan cenderung diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang. Namun, pengaruh tersebut sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran yang tinggi belum tentu mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Penyerapan anggaran cenderung hanya menunjukkan sejauh mana anggaran terealisasi, tetapi belum menggambarkan efektivitas, efisiensi, maupun kualitas penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, kemungkinan penyerapan anggaran masih berorientasi pada pencapaian target realisasi (*spending oriented*), bukan pada hasil atau manfaat (*outcome oriented*). Akibatnya, meskipun anggaran terserap, hal tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan hal ini, Pemerintah Kota Kupang diharapkan bisa menentukan skala fokus tidak berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja, efektivitas program, serta hasil yang dicapai agar dapat meningkatkan kinerja keuangan secara optimal. Berdasarkan *Agency Theory*, pemerintah sebagai agen seharusnya menggunakan anggaran untuk memenuhi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Namun, hasil penelitian menunjukkan penyerapan anggaran tidak berpengaruh signifikan, yang berarti agen cenderung fokus pada realisasi anggaran, bukan pada hasil, sehingga tujuan prinsipal belum tercapai

secara optimal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Ariesmawati, 2020).

Kondisi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan di atas diperoleh koefisien regresi variabel Kondisi Keuangan Daerah sebesar 0,284 yang menunjukkan arah positif dan t-hitung sebesar $3,394 > 1,99897$ dengan nilai sig $0,001 < 0,05$. Hipotesis (H_0) ditolak, artinya kondisi keuangan daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,284 dengan arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,394 yang lebih besar dari t-tabel 1,99897 serta nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik kondisi keuangan daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi keuangan yang baik mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta pembiayaan secara efektif dan efisien. kondisi keuangan yang baik juga memberikan ruang fiskal (*fiscal space*) yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat. Sebaliknya, kondisi keuangan yang lemah akan membatasi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan secara optimal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan tinggi rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah. kondisi keuangan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan, karena mencerminkan kapasitas fiskal dan stabilitas keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan. Kondisi keuangan daerah yang baik mencerminkan kemampuan agen dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan prinsipal. Dalam perspektif teori keagenan, hal ini menunjukkan bahwa ketika kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan berada dalam kondisi yang sehat, maka agen mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara lebih akuntabel dan selaras dengan tujuan prinsipal, semakin baik kondisi keuangan daerah, semakin tinggi pula kinerja keuangan yang dihasilkan, karena hubungan keagenan berjalan lebih efektif dan efisien.

Opini BPK Atas LKPD

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan di atas diperoleh koefisien regresi variabel Kondisi Keuangan Daerah sebesar 0,389 yang menunjukkan arah positif dan t-hitung sebesar $4,150 > 1,99897$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Hipotesis (H_0) ditolak, artinya opini BPK atas LKPD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki koefisien regresi sebesar 0,389 dengan arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,150 yang lebih besar dari t-tabel 1,99897 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap LKPD, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini BPK mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Pengaruh positif yang signifikan ini mengindikasikan bahwa opini BPK dapat dijadikan sebagai indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Opini yang baik, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara andal, transparan, dan akuntabel, sehingga mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh opini audit yang baik cenderung memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik serta mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, opini yang baik menunjukkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan *Agency Theory*, pemerintah sebagai agen wajib menyajikan laporan keuangan yang andal kepada masyarakat sebagai prinsipal. Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi bentuk pengawasan eksternal yang menilai kinerja agen. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan mengindikasikan bahwa semakin baik opini BPK, semakin baik pula kinerja keuangan, karena agen mampu menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah, dan Opini BPK Atas LKPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Kupang

Hasil dari uji F-Tabel dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai F-hitung $54.758 > F\text{-tabel } 2,361$. Nilai yang dihasilkan pada uji F diatas menjadi dasar penarikan kesimpulan bahwa hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai F-hitung sebesar 54,758 yang lebih besar dibandingkan dengan F-tabel sebesar 2,361. Temuan ini menegaskan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat kelayakan yang sangat baik (*goodness of fit*) dan secara statistik signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dapat diterima. Secara lebih mendalam, hasil ini menunjukkan bahwa seluruh dimensi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) memiliki peran yang saling berkaitan dan secara bersama-sama memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang. Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencerminkan sejauh mana sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran yang dilakukan, sehingga apabila terjadi keselarasan yang baik, maka pelaksanaan program akan lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mendistribusikan sumber daya keuangan secara proporsional dan sesuai prioritas pembangunan. Alokasi yang tepat akan mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Transparansi pengelolaan keuangan daerah juga menjadi faktor penting karena mencerminkan keterbukaan informasi kepada publik, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dimensi penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang merupakan hasil dari integrasi berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. Artinya, peningkatan kinerja tidak dapat dicapai hanya dengan memperbaiki satu dimensi saja, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi pada seluruh dimensi IPKD. Hal ini memperkuat bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel membutuhkan sinergi antar komponen dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*), di mana hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh simultan seluruh variabel tersebut menegaskan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah akan

meningkat apabila mekanisme pengendalian dalam hubungan keagenan berjalan dengan baik. Semakin optimal penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, maka semakin kecil potensi konflik keagenan dan semakin tinggi kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat teori keagenan bahwa keberhasilan kinerja organisasi sektor publik, termasuk pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh efektivitas mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam hubungan antara agen dan prinsipal. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2022) yang menunjukkan bahwa Dimensi Kesesuaian dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah, dan Opini BPK Atas LKPD berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian dokumen perencanaan, alokasi belanja APBD, transparansi pengelolaan keuangan, dan penyerapan anggaran belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang. Sebaliknya, kondisi keuangan daerah serta opini BPK atas LKPD terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan karena mencerminkan kemampuan pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, seluruh dimensi IPKD secara bersama-sama berkontribusi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, sehingga peningkatan kinerja perlu dilakukan secara terpadu pada setiap aspek pengelolaan keuangan.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Kupang sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek yang dikaji sehingga mampu mendukung perbaikan kinerja keuangan serta pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain, memperluas cakupan penyebaran kuesioner, dan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan representatif.

DAFTAR REFERENSI

- Andirfa, M., & others. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30–38.
- Ariesmawati. (2020). Perencanaan dan penganggaran terhadap kinerja perangkat daerah di Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 115–128.
- Ariesmawati, Y. (2020). *Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur*. 6(2), 258–269.
- Armaja, I. (2015). Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 77–89.
- Arniwita. (2019). Dampak penyerapan anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi kasus di Provinsi Jambi). *Prosiding*, 166–170.
- Bilqis, P. (2023). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2015-2020*. 2.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro.
- Gumelar, G. (2018). *Kesalahan penganggaran dan kelebihan pembayaran dalam belanja daerah*. <https://www.kompas.com>
- Kemenkeu. (2022). □ *Akuntabilitas APBN dan APBD Semakin Meningkatkan, Menkeu Sampaikan Tiga Prestasi*. 9–12.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- KPK. (2022). *Laporan pengelolaan keuangan daerah dan pencegahan korupsi*.
- Nasution, A. (2018). Transparansi anggaran daerah di Sumatera Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 44–59.
- Parwanto, D. (2017). Pengaruh opini BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Negara*, 6(2), 99–112.
- Priagung, D. E., & Mafudi, E. K. S. (2016). *Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik*. 2(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/at.v2i1.536>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada provinsi di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 11–21.